

ABSTRAK

Suwarni Wahab. Nomor Induk Mahasiwa (1350.02.23.2006), Judul tesis (Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Destruktif di Kota Makassar Studi Di Pengadilan Negeri Makassar Dibimbing oleh H. Hambali Thalib dan H. Syahrudin Nawi).

Tujuan penelitian: (1) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan destruktif di Kota Makassar; (2) Untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perikanan destruktif di Kota Makassar.

Metode penelitian adalah penelitian hukum social yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum mengenai tindak pidana perikanan destruktif yang terjadi di Kota Makassar dengan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan destruktif yang terjadi di Kota Makassar serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perikanan destruktif.

Hasil penelitian: (1) Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2004 tentang Perikanan terhadap perkara *Destructive Fishing* pada putusan Pengadilan Negeri Makassar selama kurun waktu antara tahun 2014-2016 merupakan bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Perikanan, namun masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya Penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para terdakwa *destructive fishing* maupun Hakim dalam penjatuhan putusan kepada para terdakwa *destructive fishing*. (2) Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *destructive fishing* adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *destructive fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *destructive fishing*.

Rekomendasi: (1) Dalam penjatuhan sanksi seharusnya lebih mempertimbangkan efek jera bagi para terdakwa dan dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut sanksi yang maksimal serta menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin agar dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana perikanan serta dapat meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan di Kota Makassar. (2) Masih perlu ditingkatkannya fungsionalisasi peraturan serta penerapan hukum oleh Hakim dan juga sosialisasi terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat tentang tindak pidana *destructive fishing* agar terbentuk kerjasama yang terpadu antara masyarakat dan aparat dalam rangka memberantas tindak pidana *destructive fishing*.

ABSTRACT

Suwarni Wahab. Student Identity Number (1350.02.23.2006), Title of thesis (The Law Enforcement of Destructive Fishing Crime in Makassar City With The Study in Jurisdiction of Makassar District Court is supervised by H. Hambali Thalib and H. Syahrudin Nawir).

Research objectives: (1) to analyze of law enforcement on destructive fishing custody in Makassar City; (2) to analyze about the factors causing the destructive fishing crime in Makassar.

The research method is social law research that is research done with approach to legal reality in society. This research is based on the existence of symptom of the gap between hope (das sollen) with reality (das sein) in the field of law concerning destructive fishing crime that happened in Makassar City by studying law enforcement against destructive fishing crime happened in Makassar City and analyze regulation related to destructive fishing crime.

The Result of research: (1) The application of Act No. 31 of 2004 jo Act No. 45 of 2009 about changes in the law number 31 of 2004 about Fisheries of some cases in jurisprudence of Makassar District Court the period between 2014 - 2017 as the law enforcement of destructive fishing it is execution not optimal. This is because demands of prosecutors and the judge in dropping the verdict on the defendant destructive fishing is not maximal (2) The factors causing destructive fishing are the economic factor of the low fisherman society, the minimal knowledge factor of the danger and the impact of destructive fishing, and the low educational factors that tend to think instantly without taking into account the consequences of destructive fishing.

Recommendation: (1) In the imposition of sanctions it should be more consider the deterrent effect for the defendants and his compensated demman for punishment is maximum and jurisprudence as muach as possible so that can prevent the others not to do fishing crime an can minimize criminal act in the field of fisheries.(2) It is still necessary to improve law enforcement and the community about destructive fishing crime in order to establish an integrated cooperation between the community and the authorities in the framework of eradicating the destructive fishing crime.